



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Economic Coercion Tiongkok Terhadap Australia:  
2019-2021***

Skripsi

Oleh

Kennedy Yeremia Alexander Abraham

6091801212

Bandung

2022



**Parahyangan Catholic University**

**Faculty of Social Science and Political Science**

**International Relations Study Undergraduate Program**

*Excellent Accreditation*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**China's Economic Coercion Against Australia:  
2019-2021**

Undergraduate Thesis

Written by

Kennedy Yeremia Alexander Abraham

6091801212

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Economic Coercion Tiongkok Terhadap Australia:  
2019-2021***

Oleh

Kennedy Yeremia Alexander Abraham

6091801212

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

Bandung

2022



**Parahyangan Catholic University**

**Faculty of Social Science and Political Science**

**International Relations Study Undergraduate Program**

*Excellent Accreditation*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**China's Economic Coercion Against Australia:  
2019-2021**

Written by

Kennedy Yeremia Alexander Abraham

6091801212

Counseled by

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Kennedy Yeremia Alexander Abraham  
Nomor Pokok : 6091801212  
Judul : *Economic Coercion* Tiongkok Terhadap Australia: 2019-2021

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 24 Juni 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. A. Irawan J.H

:

**Sekretaris**

Dr. Aknolt K. Pakpahan

:

**Anggota**

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

:

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kennedy Yeremia Alexander Abraham

NPM : 6091801212

Jurusan/Program Studi: Hubungan Internasional

Judul : *Economic Coercion* Tiongkok Terhadap Australia:  
2019-2021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Kennedy Yeremia Alexander Abraham

## ABSTRAK

Nama : Kennedy Yeremia Alexander Abraham

NPM : 6091801212

Judul : *Economic Coercion* Tiongkok Terhadap Australia: 2019-2021

---

Penelitian ini mengkaji hubungan bilateral Australia dan Tiongkok. Kedua negara selama beberapa tahun ke belakang berbagi hubungan dagang yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Seiring berkembangnya waktu, hubungan keduanya mengalami kemunduran yang cukup pesat. Kedua negara sering kali menemukan pihaknya berdiri di posisi yang berlawanan dengan rekannya dalam situasi politik internasional. Hubungan memburuk sampai pada titik Tiongkok menekankan *economic coercion* terhadap Australia. Maka dari itu, penelitian ini dituliskan untuk mengetahui “Mengapa Tiongkok melakukan tindakan *economic coercion* kepada Australia pada tahun 2019-2021?” Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka teori *economic coercion*, *power transition theory* dan pandangan geoekonomi. Penulis menemukan beberapa temuan dalam penelitian ini. Pertama adalah bahwasanya *economic coercion* yang dikenakan Tiongkok terhadap Australia adalah keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan situasi politik. Secara lebih luas, Tiongkok merasa bahwa Australia yang sebelum dikenakan koersi menjadi oposisi politik yang menghambat Tiongkok dalam memperoleh kepentingannya merupakan perpanjangan tangan Amerika Serikat dalam menekan Tiongkok. Sehingga *economic coercion* yang Tiongkok lakukan merupakan tindakan retaliasi terhadap tindakan Australia.

**Kata Kunci:** Hubungan Bilateral, *Economic coercion*, Kepentingan Politik

## ABSTRACT

*Name : Kennedy Yeremia Alexander Abraham*

*NPM : 6091801212*

*Title : China's Economic Coercion Against Australia: 2019-2021*

---

*This research examines the bilateral relationship between Australia and China. Over the past two years, the two countries have engaged in a trade relation that have greatly benefited both parties. Over time the relationship between the two experienced a fairly rapid setback. Both countries often find themselves standing in opposite position to their counterparts in international politic situations. The relations deteriorated to the point that China emphasized economic coercion against Australia. Therefore, this research is written to find out “Why China take economic coercive measures against Australia in 2019-2021?” In answering this research question, the author will use the theoretical framework of economic coercion, power transition theory and geoeconomics view. The author found several findings in this study. The first is that the economic coercion that China imposed on Australia is a decision taken by taking the political situation into account. More broadly, China feels that Australia, which before being subjected to coercion became a political opposition that prevented China from obtaining its interest, was an extension of the United States in pressuring China. Therefore, China's economic coercion is an act of retaliation against Australia's action.*

**Keyword:** *Bilateral Relation, Economic Coercion, Political Interest*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kebaikannya, penyertaannya, dan kasih karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang diberi judul “***Economic Coercion* Tiongkok Terhadap Australia: 2019-2021**” tepat waktu.

Penelitian ini dituliskan untuk mengetahui alasan sebenarnya dibalik tindak *economic coercion* Tiongkok terhadap Australia pada periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Sebelumnya Tiongkok dan Australia berbagi hubungan dagang yang sangat erat dan menguntungkan kedua belah pihak. Mutualisme hubungan ini sampai pada titik keduanya mencetuskan perjanjian perdagangan bilateral guna semakin merendahkan hambatan perdagangan diantara keduanya. Akan tetapi hubungan dagang yang diprospek menjadi sesuatu yang besar dan megah bagi keduanya tidak bertahan lama. Keduanya kemudian berselisih dan hubungan keduanya kini menjadi retak. Penulis berharap melalui penelitian ini Penulis dapat berkontribusi dalam mengembangkan kajian hubungan internasional, secara lebih spesifik kajian hubungan Australia dengan Tiongkok. Penelitian ini juga diajukan guna memperoleh gelar Strata Satu Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari keterbatasannya dan ketidaksempurnaan penelitian yang diajukan. Penulis meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Penulis terbuka atas kritik, saran, dan masukan dari pihak-pihak lain yang dapat membantu mengembangkan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini diajukan.

Bandung, 13 Juni 2022

Kennedy Yeremia Alexander Abraham

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pujian dan syukur tertinggi Penulis tunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya, bimbingan-Nya, dan Kasih-Nya penulis dimampukan untuk menyelesaikan pengerjaan penelitian skripsi. Penulis akan selalu mengucapkan syukur atas semua berkat yang memampukan Penulis dalam menjalani kehidupan termasuk juga dalam masa penulisan skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Henry Robert Abintur Hutagaol dan Imelda Amora Riaulita Simamora yang telah bersabar dalam mendidik dan membesarkan penulis, mendukung Penulis secara fisik dan mental, yang juga membiayai kehidupan serta memampukan Penulis dalam menyelesaikan masa studinya. Skripsi ini Penulis persembahkan kepada mereka.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua adik Penulis, Patricia Regina Aster Hutagaol dan Laurencia Nathania Nintaria Hutagaol yang terkadang masih peduli dan memperhatikan kakaknya di masa-masa terberat kehidupannya. Penulis bersyukur atas kehadiran mereka dalam kehidupan Penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bang Aknolt Kristian Pakpahan yang sudah bersabar dalam membimbing dan memberikan masukan terhadap penelitian penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Meminta maaf juga apabila selama masa bimbingan Penulis melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang kurang baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga ajar Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis berterimakasih atas segala ilmu dan pelajaran yang diterima selama masa studi di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis berterimakasih kepada Bapak Dodi beserta istri yang sudah membantu merawat dan memperhatikan kehidupan Penulis selama di Bandung. Semoga bapak beserta keluarga sehat selalu.

Penulis mengucapkan syukur dan berterimakasih atas komunitas rohani *Mission 21* yang sudah menerima Penulis dan menghabiskan banyak waktu bersama. Terima kasih kepada Ko Bambang Ardhi, Ko Yosua Eka, Ko Genesius Imantaka, Ci Laura Balfour, Ko Yanuar Gandhira, Ci Olivia Winata, Ko Andreas, Jonathan Dinbara, Kenny Dylan, Alexander Sebastian, Vincent Tandreaan, Gerry Sebastian, Sherly Putri, Alan Darmasaputra, Felicia Koris, Clarisa Irene, Valerie dan yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah mewarnai kehidupan penulis.

Penulis berterima kasih juga kepada teman-teman Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 18 yang sudah menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan penulis. Seerat apapun atau sejarang apapun bertemu penulis bersyukur atas kehadiran kalian. Terima kasih kepada Simon Sihombing, Rafqyandithka, Valdy, Ben Manik, Ibnu Haikal, Vishnu, Abraham Satriaseno, Ignatius Satria, Naufal Hanif, Gevian, Rizky, Stephany, Levana, Alexa, Kinanti, Glenda, Devina, Tiara, Caesaria, Jefferson, Rere, Kevin, Ryo, Ihsan, Owen, Axel, Sandy, Wijak, Gozali. Terima kasih atas waktu kalian.

Terima kasih kepada Kaifa Raihana Fatah yang telah membantu Penulis memberi arahan dalam merapikan struktur skripsi penulis.

Penulis juga berterimakasih kepada teman-teman mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan lainnya yang belum disebutkan. Penulis berterimakasih atas kehadiran kalian sekecil apapun di dalam masa perkuliahan penulis.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah.....</b>	<b>3</b>
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3 Pertanyaan Penelitian.....	12
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	13
<b>1.4 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>13</b>

<b>1.5 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>18</b>
<b>1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan.....</b>	<b>30</b>
1.6.1 Metode Penelitian .....	30
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	32
<b>1.7 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB II Hubungan Australia-Tiongkok: Ekonomi dan Politik.....</b>	<b>34</b>
<b>2.1. Profil Tiongkok.....</b>	<b>35</b>
2.1.1 Kebangkitan Ekonomi dan Industri Tiongkok.....	38
2.1.2. Tiongkok Dalam Struktur Internasional .....	42
<b>2.2. Profil Australia .....</b>	<b>46</b>
2.2.1. Sektor Ekonomi Australia.....	48
2.2.2. Australia dalam Struktur Internasional .....	51
2.2.2.1. Australia dan Tiongkok.....	51
2.2.2.2. Australia dan Amerika Serikat.....	55
2.2.2.3. Australia di Asia Pasifik.....	58
<b>2.3. Perkembangan Hubungan Tiongkok-Australia .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB III <i>Economic coercion</i> Tiongkok Terhadap Australia Sebagai Implementasi Kebijakan Luar Negeri Tiongkok .....</b>	<b>68</b>
<b>3.1. Kronologis Koersi Tiongkok kepada Australia .....</b>	<b>69</b>
3.1.1 Komoditas yang Dikenakan Tarif.....	70

3.1.2. Dampak Pengenaan Tarif.....	82
3.1.2.1. Bagi Australia.....	83
3.1.2.2. Bagi Tiongkok.....	86
3.1.3. Upaya Penyelesaian Konflik.....	91
<b>3.2. Kepentingan Dibalik <i>Economic coercion</i> .....</b>	<b>94</b>
3.2.1. <i>Economic coercion</i> Tiongkok sebagai Pertunjukan Kekuatan Ekonomi .....	95
3.2.2. <i>Economic coercion</i> Tiongkok sebagai Kelanjutan Kepentingan Politik .....	107
3.2.2.1. Rivalitas Tiongkok-Amerika Serikat... ..	110
3.2.2.2. Teori Transisi Kekuatan... ..	112
3.2.2.3. Geoekonomi .....	114
3.2.2.4. <i>Economic Coersion</i> .....	115
3.2.2.5. Laut Tiongkok Selatan... ..	116
3.2.2.6. Huawei... ..	118
3.2.2.7. Penyelidikan COVID-19.....	120
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>123</b>
<b>4.1. Kesimpulan .....</b>	<b>123</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>126</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tujuan Pasar Awal dan Akhir Ekspor Australia Pasca <i>Economic coercion</i> .....	84
Tabel 3.2. Ekspor delapan komoditas Australia ke Tiongkok dan negara lain (2019- 2021) .....	86
Tabel 3.3. Eksportir Awal dan Akhir Komoditas Menuju Tiongkok Pasca <i>Economic coercion</i> .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Model <i>Economic Coercion</i> Dalam Tulisan Daniel W. Drezner.....	25
Gambar 1.2. Piramida <i>Transition Theory</i> Dilansir dari Tulisan David Lai .....	29
Gambar 3.1. Penurunan Ekspor <i>wine, barley</i> dan lobster Australia ke Tiongkok	71
Gambar 3.2. Ekspor <i>barley</i> Australia per tahun.....	73
Gambar 3.3. Ekspor batu bara Australia per tahun .....	80
Gambar 3.4. Harga dan Pengiriman <i>barley</i> dari Australia dan beberapa negara penghasil <i>barley</i> lain ke Tiongkok dan Arab Saudi .....	90
Gambar 3.5. Jumlah Ekspor Australia Menuju Tiongkok .....	103
Gambar 3.6. <i>Gross Domestic Product</i> Tiongkok per Tahun .....	104
Gambar 3.7. <i>Gross Domestic Product per Capita</i> Tiongkok per Tahun .....	104



**DAFTAR SINGKATAN**

AUSFTA	<i>The Australia-United States Free Trade Agreement</i>
AUSMIN	<i>The Australia–United States Ministerial Consultations</i>
ANZUS	<i>Australia New Zealand United States</i>
BRI	<i>Belt and Road Initiative</i>
CCP	<i>China Communism Party</i>
ChAFTA	<i>China-Australia Free Trade Agreement</i>
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
Ekopolin	Ekonomi Politik Internasional
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GRDC	<i>Grain Research and Development Corporation</i>
LTS	Laut Tiongkok Selatan
WTO	<i>World Trade Organization</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan internasional merupakan sebuah program studi yang lahir seiring dengan bertumbuhnya konflik dan peperangan antar negara. Kajian ini utamanya mempelajari mengenai hubungan-hubungan antara negara dalam struktur internasional. Dengan bertumbuhnya kajian ilmu hubungan internasional, semakin banyak bidang yang kini dicakup dalam kajian keilmuan program studi ini. Hubungan internasional bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, menimbang dalam hubungan antar negara ada banyak aspek dan bidang lainnya yang perlu dipertimbangkan. Sehingga secara langsung bidang keilmuan ini kemudian menyerap beberapa pemahaman dari bidang-bidang keilmuan lainnya seperti ekonomi, hukum, psikologi, budaya dan yang lainnya. Seperti ditekankan sebelumnya, hubungan internasional mengkaji hubungan antar negara. Hubungan yang dimaksud dapat berarti hubungan yang positif seperti kerja sama maupun hubungan yang negatif seperti perang dan konflik.

Tiongkok dan Australia merupakan satu dari banyaknya hubungan dua negara atau yang disebut sebagai hubungan bilateral dalam tatanan internasional. Secara sederhana, sebuah atau beberapa negara akan menjalin suatu hubungan apabila pihaknya memandang hubungan yang tercipta dapat dimanfaatkan untuk

mencapai kepentingan atau keinginannya. Sama halnya dengan hubungan Tiongkok-Australia. Hubungan Australia dengan Tiongkok terjalin atas dasar kepentingan ekonomi. Keduanya saling memandang rekan dagangnya sebagai pasar yang dapat memperbesar keuntungannya. Hubungan dagang keduanya pada awalnya merupakan hubungan yang sangat baik. Hubungan dagang keduanya bahkan sampai kepada titik dimana dirasa perlu ada perjanjian perdagangan bilateral antara keduanya, perjanjian yang disebut *China Australia Free Trade Area* (ChAFTA). Intensi dari penciptaan perjanjian perdagangan ini disambut baik oleh kedua belah pihak.

Namun hubungan positif keduanya tidak berlangsung begitu lama. Pada 2016, mulai terlihat indikasi bahwa hubungan keduanya dapat hancur. Meskipun hubungan dagang keduanya saling menguntungkan, sangat disayangkan bahwa kepentingan politik keduanya selalu berseberangan. Semenjak tahun 2016, Australia dan Tiongkok selalu berada dalam pihak yang berlawanan dalam memandang suatu fenomena internasional. Sehingga memang terlihat bahwa secara politis, keduanya sangat sulit menyatukan pandangannya. Australia kerap kali berdiri menahan kepentingan Tiongkok dalam membentuk lingkungan eksternalnya menjadi ideal bagi pertumbuhannya. Tentunya perbedaan pandangan dalam kepentingan ini menjadi alasan menyulutnya konflik hubungan Tiongkok dan Australia.

Setelah mulai terlihat perbedaan signifikan antara keduanya selama beberapa tahun. Barulah pada 2019 sampai dengan 2020 percikan konflik mulai semakin jelas terlihat. Tiongkok pada tahun 2019 membatasi pasokan batu bara dari

Australia untuk masuk ke dalam pasar Tiongkok. Kemudian disusul dengan sanksi ekonomi terhadap beberapa komoditas yang vital bagi perdagangan keduanya. Sanksi yang dikenakan berbentuk tarif, pembekuan komoditas, serta pelarangan pembelian produk secara tidak resmi. Sanksi ekonomi sendiri pada masa kini dianggap sebagai senjata. Dimana sanksi ekonomi merupakan suatu tindakan yang umum digunakan oleh negara untuk menindak atau membalas negara oposisinya saat pihak oposisi mengeluarkan kebijakan atau tindakan yang dianggap melukai kepentingannya. Umumnya, sanksi ekonomi dikenakan terhadap suatu pihak yang juga melakukan pelanggaran ekonomi terhadap oposisinya. Namun dalam konteks hubungan internasional, sanksi ekonomi kini juga merupakan suatu tindakan yang dapat diambil dengan pertimbangan politis. Sehingga inti dari penelitian ini adalah sanksi ekonomi sebagai bentuk *economic coercion* Tiongkok terhadap Australia, sebagai suatu bentuk kebijakan Tiongkok dalam mengubah arah politik Australia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Hubungan antara Australia dan Tiongkok mulai memanas sejak tahun 2016.<sup>1</sup> Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, yang menjabat pada saat memanasnya hubungan Australia Tiongkok, mengatakan bahwa Tiongkok

---

<sup>1</sup>Okano, Yoji. Rep. *DEEPENING CONFLICT BETWEEN AUSTRALIA AND CHINA: A TRANSITION PERIOD TO A NEW EQUILIBRIUM POINT*. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd , 2021.

sedang berupaya menjauhkan Australia dari para sekutunya.<sup>2</sup> Perdana Menteri Australia yang menjabat saat ini, Scott Morrison, juga menambahkan bahwa selama ini Australia tidak melakukan suatu hal apa pun yang melukai hubungan perdagangan ataupun kerja sama lainnya dengan Tiongkok.<sup>3</sup>

Ada beberapa aktivitas yang memperburuk relasi Australia dengan Tiongkok. Pada tahun 2016, hal yang paling mempengaruhi relasi keduanya adalah saat Australia meminta Tiongkok menerima arbitrase Laut Cina Selatan.<sup>4</sup> Tentunya ini menjadi bagian yang cukup penting untuk dilihat. Menimbang bahwa Tiongkok memegang kepentingan besar dalam Laut Cina Selatan, bahkan kasus Laut Cina Selatan merupakan salah satu prioritas utama Tiongkok. Dapat terlihat bagaimana beberapa tahun ke belakang, Tiongkok akan selalu berupaya mengakuisisi dan menguasai Laut Cina Selatan. Bahkan agenda ini sudah ada dan dibahas sejak sekitar tahun 1930-1960.<sup>5</sup> Tentunya ini mengindikasikan bahwa Australia menolak adanya kekuasaan Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan, sekaligus juga menjadi salah satu faktor yang semakin merusak hubungannya ke depannya.

---

<sup>2</sup> Laurenceson, James. "Costly Choices: Establishing the Facts of Australia's China Policy since 2016." Australian Institute of International Affairs. Australian Institute of International Affairs, 24 Maret, 2021. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/costly-choices-establishing-the-facts-of-australias-china-policy-since-2016/>. (Diaksea pada 4 November, 2021)

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Okano, Yoji. Rep. *DEEPENING CONFLICT BETWEEN AUSTRALIA AND CHINA: A TRANSITION PERIOD TO A NEW EQUILIBRIUM POINT*. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd, 2021.

<sup>5</sup> Jinming, Li, and Li Dexia. "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note." *Ocean Development & International Law* 34, no. 3-4 (2003): 287-95. <https://doi.org/10.1080/00908320390221821>.

Pada tahun 2017, terdapat isu dimana Partai Komunis Tiongkok mulai masuk ke Australia.<sup>6</sup> CCP<sup>7</sup> dinyatakan masuk ke dalam Australia untuk mempengaruhi media, perilaku akademisi dan juga keputusan para perwakilan atau representasi.<sup>8</sup> Tentunya ini adalah tindakan yang dianggap Australia sebagai suatu tindakan ofensif. Masuknya CCP ke dalam Australia dilihat sebagai suatu tindakan *espionage* atau mata-mata sekaligus sabotase terhadap suatu negara. Tentunya isu ini mengundang amarah dari pihak Australia dan pihaknya menuduh Tiongkok atas tindakan ancamannya. Tiongkok kemudian membalas bahwa pendirian Australia atas isu ini menyebabkan adanya keretakan dalam hubungan bilateral keduanya sekaligus menunjukkan adanya ketidakpercayaan Australia atas Tiongkok<sup>9</sup> Apabila memang benar bahwa Tiongkok mengirimkan mata-mata, dan memang ada banyak sekali pengakuan dari masyarakat Australia yang keluarganya berada di Tiongkok,<sup>10</sup> ini sebenarnya menandakan adanya intensi Tiongkok untuk masuk, memperoleh informasi atau bahkan menimbulkan keresahan dalam politik domestik Australia. Tentunya tindakan semacam itu sudah disebut sebagai tindakan

---

<sup>6</sup> McKenzie, Nick, Chris Uhlmann, Sashka Koloff, and Richard Baker . “The Chinese Communist Party's Power and Influence in Australia.” ABC News. ABC News, 29 Maret, 2018. <https://www.abc.net.au/news/2017-06-04/the-chinese-communist-partys-power-and-influence-in-australia/8584270>. (Diakses pada 2 November, 2021)

<sup>7</sup> *China Communist Party* sebutan lain bagi Partai Komunis Tiongkok

<sup>8</sup> The Guardian. “Turnbull Says Australia Will 'Stand up' to China as Foreign Influence Row Heats Up.” The Guardian. Guardian News and Media, December 9, 2017. <https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/09/china-says-turnbulls-remarks-have-poisoned-the-atmosphere-of-relations>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> McKenzie, Nick, Chris Uhlmann, Sashka Koloff, and Richard Baker “The Chinese Communist Party's Power and Influence in Australia.” ABC News. ABC News, 29 Maret, 2018. <https://www.abc.net.au/news/2017-06-04/the-chinese-communist-partys-power-and-influence-in-australia/8584270>. (Diakses pada 2 November, 2021)

yang dilandaskan ketiadaannya kepercayaan yang mutual dan absolut. Australia tidak sepenuhnya salah dalam mengeluarkan tudingan atas perilaku Tiongkok.

Tahun 2018 adalah tahun yang cukup menarik, tahun dimana Tiongkok terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Pertama perlu diingat bahwa Australia adalah rekan dan sekutu Amerika Serikat di wilayah Asia, tentunya juga keduanya memiliki hubungan dagang yang sangat baik.<sup>11</sup> Kedekatan keduanya didukung juga oleh adanya persamaan nilai dan ideologi yang dianutnya, sehingga keduanya memiliki kecenderungan perilaku yang cukup serupa sebagai negara demokratis. Fakta ini sendiri memang sudah dapat membuat Tiongkok khawatir terhadap Australia. Akan tetapi hal yang perlu dilihat adalah bagaimana di tahun yang sama mulai terlihat pertentangan ekonomi yang nyata di antara Australia dan Tiongkok. Dimana pada Agustus 2018, Australia melarang masuknya Huawei<sup>12</sup> serta jaringan 5G yang diimpor dari Tiongkok.<sup>13</sup> Tentunya Australia memiliki alasan kuat atas pelarangan produk ini. Utamanya adalah ketakutannya terhadap isu keamanan digital serta potensi adanya kegiatan spionase dari Tiongkok. Tentunya keputusan ini juga bukan sekedar spekulasi kosong tanpa landasan bagi pihak Australia, dimana diketahui bahwa dalam hukum Tiongkok perusahaan harus bekerja sama dengan layanan intelijen.<sup>14</sup> Amerika Serikat sebelumnya juga sudah melakukan hal yang sama dengan Australia dengan alasan yang sama pula.

---

<sup>11</sup> U.S. Department of State. "U.S. Relations with Australia - United States Department of State." U.S. Department of State. U.S. Department of State, 14 April, 2021. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-australia/>. (Diakses pada 4 November, 2021)

<sup>12</sup> Sebuah *brand* produk elektronik yang berasal dari Perusahaan Tiongkok

<sup>13</sup> BBC News. "Huawei and ZTE Handed 5G Network Ban in Australia." BBC News. BBC, 23 Agustus, 2018. <https://www.bbc.com/news/technology-45281495>. (Diakses pada 2 November, 2021)

<sup>14</sup> *Ibid.*

Tentunya dalam kasus perang dagang keduanya pelarangan Huawei masuk ke pasar Amerika Serikat merupakan awal dari adanya pertempuran pelarangan komoditas serta kenaikan tarif produk. Hal yang sama juga dialami oleh Australia ke depannya, dimana terdapat sekali batasan dan hambatan Australia dalam mengirimkan produk eksportnya ke depannya.

Pada tahun 2019, eskalasi pembatasan komoditas berlanjut. Pada tahun ini Tiongkok melarang masuknya pengiriman bahan bakar, utamanya batu bara, dari Australia.<sup>15</sup> Tentunya ini merupakan sebuah keputusan yang besar bagi kedua belah pihak.<sup>16</sup> Tindakan ini tidak sesederhana adanya pemutusan hubungan perdagangan komoditas tertentu antar dua pihak. Tiongkok merupakan konsumen energi terbesar di dunia dengan 50% bahkan lebih dari kegiatannya terutama dalam sektor industri membutuhkan batu bara.<sup>17</sup> Sehingga ini keputusan yang cukup berbahaya bahkan kritis bagi Tiongkok dimana perkembangan ekonominya berpotensi terhambat. Untuk mengatasi potensi perlambatan ekonomi dan pengembangan industri, Tiongkok mengubah haluan impor batu baranya kepada Rusia, Mongolia, Indonesia dan beberapa negara lainnya<sup>18</sup> Tindakan ini juga merusak harga batu bara dalam

---

<sup>15</sup> Uren, David. "Beijing's Ban on Australian Coal Is Hurting China." *The Strategist*, 14 September, 2021. <https://www.aspistrategist.org.au/beijings-ban-on-australian-coal-is-hurting-china/>. (Diakses pada 2 November, 2021)

<sup>16</sup> Hout, Kiara van. "Holding a Wolf by the Ears: The Conflict between Chinese Trade Restrictions and Domestic Demand." *Australian Institute of International Affairs*. Australian Institute of International Affairs, 14 Januari, 2021. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/holding-a-wolf-by-the-ears-the-conflict-between-chinese-trade-restrictions-and-domestic-demand/>. (Diakses pada 2 November, 2021)

<sup>17</sup> Cheng, Evelyn. "China Has 'No Other Choice' but to Rely on Coal Power for Now, Official Says." *CNBC*. CNBC, 29 April, 2021. <https://www.cnbc.com/2021/04/29/climate-china-has-no-other-choice-but-to-rely-on-coal-power-for-now.html>. (Diakses 2 November, 2021)

<sup>18</sup> Choudhury, Saheli Roy. "China Needs Coal, and Australia Has It. but Something's Standing in the Way." *CNBC*. CNBC, 5 Oktober, 2021. <https://www.cnbc.com/2021/10/05/china-power-supply-crunch-relationship-with-australia-gdp-outlook.html>. (Diakses pada 2 November, 2021)



pasar domestik kedua negara. Dimana harga batu bara di Australia menurun drastis sedangkan harga batu bara di Tiongkok naik secara signifikan, merusak stabilitas harga batu bara di pasar kedua negara. Bagi Australia juga keputusan ini tidaklah ringan. Australia diketahui sebagai salah satu negara pengirim batu bara terbesar di dunia terutama kepada Tiongkok.<sup>19</sup> Dimana dahulu sekitar 55% dari batu bara Tiongkok berasal dari Australia.<sup>20</sup> Selain keputusan ini saling menyakiti kedua belah pihak, kasus ini juga menjadi salah satu eskalasi yang akan menyebabkan lebih banyak keretakan hubungan keduanya ke depannya. Menimbang bahwa keputusan ini adalah sepenuhnya atas dasar politik.

Pada tahun 2020, terjadi suatu insiden yang semakin merusak hubungan keduanya. Menarik kembali kepada tahun 2019, ada dua hal yang ikut terbawa dalam periode ini. Pertama adalah pelarangan batu bara Australia untuk masuk ke dalam pasar Tiongkok, hal lain adalah adanya pandemi COVID-19 yang bersumber dari Tiongkok dan kini masuk dan masih menyebar di hampir seluruh negara. Tepatnya pada April 2020, menyusul persebaran COVID-19, Australia menyatakan keinginannya untuk melakukan investigasi terhadap COVID-19.<sup>21</sup> Bukan hanya ini menunjukkan ketidakpercayaan tinggi Australia terhadap Tiongkok, tetapi juga ini perilaku yang sangat melukai Tiongkok. Pernyataan ini ditindak lanjuti dengan Tiongkok yang sepenuhnya menghentikan pengiriman batu bara yang bersumber

---

<sup>19</sup> Uren, David. "Beijing's Ban on Australian Coal Is Hurting China." *The Strategist*. The Strategist, 14 September, 2021. <https://www.aspistrategist.org.au/beijings-ban-on-australian-coal-is-hurting-china/>. (Diakses pada 2 November, 2021)

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Okano, Yoji. Rep. *DEEPENING CONFLICT BETWEEN AUSTRALIA AND CHINA: A TRANSITION PERIOD TO A NEW EQUILIBRIUM POINT*. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd., 2021.

dari Australia menyusul posisinya terhadap Tiongkok,<sup>22</sup> tentunya posisi yang dimaksud juga termasuk pertentangan Australia terhadap Tiongkok yang berdampak pada perdagangan batu bara.<sup>23</sup> Di tahun ini juga batasan tarif perdagangan produk Australia ke dalam pasar Tiongkok naik drastis.<sup>24</sup> Juga beriringan dengan inisiatif Australia yang semakin meningkat dalam melacak awal mula perkembangan COVID-19.<sup>25</sup> Peningkatan tarif terhadap beberapa komoditas ekspor Australia, termasuk batu bara, kemudian terus berlanjut sampai dengan 2021 sekaligus akan menjadi hal yang diperdalam dalam penelitian ini.

Tahun terakhir yang akan dibahas adalah tahun 2021, tahun yang sama dimana penelitian ini dituliskan. Hal yang paling penting untuk dicatat adalah posisi Australia kini terhadap Tiongkok pasca terjadinya pertikaian ekonomi yang cukup intens. Perlu diingat lagi bahwa Australia adalah rekan Amerika Serikat di wilayah Asia. Namun selain itu juga Australia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Britania Raya. Menimbang juga Britania Raya adalah rekan dekat Amerika Serikat sejak dahulu. Keduanya juga merupakan rekan yang dekat terkait isu keamanan. Maka dari itu eskalasi yang terjadi di tahun ini mulai merambat pada masalah

---

<sup>22</sup> Lkhaajav, Bolor. "Can Russia and Mongolia Replace Australia's Coal Supply to China?" – The Diplomat. for The Diplomat, 26 Oktober, 2021. <https://thediplomat.com/2021/10/can-russia-and-mongolia-replace-australias-coal-supply-to-china/>. (Diakses pada 2 November, 2021)

<sup>23</sup> The Guardian. "Australia Insists Who Inquiry into Covid Origin Must Be Robust, despite China Tensions." The Guardian. Guardian News and Media, 28 Desember, 2020. <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/australia-insists-who-inquiry-into-covid-origin-must-be-robust-despite-china-tensions>. (Diakses pada 2 November, 2021)

<sup>24</sup> BBC News. "Australia Accuses China of Undermining Trade Agreement." BBC News. BBC, 9 Desember, 2020. <https://www.bbc.com/news/world-australia-55240898>. (Diakses 2 November, 2021)

<sup>25</sup> Lucanus, Anton. "China Unleashes Brutal Wolf-Warrior Diplomacy on Australia." Australian Institute of International Affairs. Australian Institute of International Affairs, 26 November, 2020. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/china-unleashes-brutal-wolf-warrior-diplomacy-on-australia/>. (Diakses pada 2 November, 2021)

keamanan. Pada tahun ini Australia, Amerika Serikat dan Britania Raya menjadi mitra kerja sama keamanan, kerja sama secara spesifik akan berupa usaha menantang kekuasaan Tiongkok di wilayah Asia Pasifik.<sup>26</sup> Bentuk kerja sama lebih dalam berkaitan dengan adanya pembelian kapal selam dari Perancis, lebih jauh dalam kesepakatan kerja sama Amerika Serikat dan Britania Raya berjanji akan membantu Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir untuk melawan (*counter*) kapal bertenaga nuklir milik Tiongkok.<sup>27</sup> Sehingga kini pertikaian sudah mengambil rupa eskalasi pertentangan kekuatan (*power balance*) di wilayah sekitar Asia Tenggara.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam tulisan ini akan terdapat pembatasan waktu. Perlu diingat bahwa fenomena yang akan dibahas merupakan suatu fenomena dengan rantai kronologi yang cukup panjang. Namun penelitian hanya akan dibatasi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Alasan utamanya adalah dengan menimbang bahwa hubungan antara Australia dan Tiongkok mulai mengalami penurunan dari tahun 2016 dan terus berkembang hingga pada tahun-tahun berikutnya. 2021 dijadikan periode terakhir menimbang tahun tersebut adalah tahun dimana tulisan ini mulai dibuat, dimana juga peristiwa penekanan ekonomi terhadap Australia masih terjadi

---

<sup>26</sup> Tan, Weizhen, and Yen Nee Lee. "China Could Accelerate Military Efforts in Response to U.s.-Australia Submarine Deal, Analyst Says." CNBC. CNBC, 4 Oktober, 2021. <https://www.cnbc.com/2021/09/21/australia-us-submarine-deal-may-prompt-china-to-expand-military-capabilities.html>. (Diakses 2 November, 2021)

<sup>27</sup> Ibid.

di tahun tersebut. Tahun 2019-2021 dalam judul penelitian mengacu pada tahun dimana *economic coercion* dikenakan, akan tetapi penelitian utamanya juga mengkaji tahun 2016-2018 dengan pertimbangan berpengaruh sebagai kronologi penyebab *economic coercion*.

Dalam tulisan ini, masalah yang akan dibahas hanya akan dibatasi pada tindakan-tindakan Tiongkok dan Australia. Aktor utama dalam pembahasan ini adalah Australia dan Tiongkok yang juga merupakan objek utama penelitian, akan tetapi sudut pandang lebih mengutamakan pandangan Tiongkok. Selanjutnya mungkin juga akan membahas beberapa negara sebagai aktor pendukung. Akan tetapi perannya dalam tulisan ini hanyalah sebagai aktor yang membantu guna mengisi kekosongan informasi ataupun memiliki tindakan yang memiliki dampak terhadap topik utama. Salah satu negara yang menjadi negara yang mungkin membantu adalah Amerika Serikat dan mungkin kumpulan negara lainnya. Kumpulan negara suplemen tersebut dan tindakannya hanya akan disebutkan (tindakannya dan dampaknya terhadap topik utama) tidak akan diperdalam lebih lanjut.

Hal lainnya yang juga akan dibatasi dalam penelitian ini adalah komoditas yang akan diteliti. Dalam konflik sanksi ekonomi Tiongkok-Australia terdapat beberapa komoditas yang dikenakan sanksi, bahkan mungkin lebih banyak dari yang penulis tahu. Maka dari itu penulis hanya akan memilih beberapa komoditas saja yang akan dibahas. Alasan komoditas tersebut yang dipilih ada dua. Pertama adalah dari kesediaan data dan seberapa sering komoditas itu disebutkan dalam ucapan pemegang kepentingan, artikel, penelitian, ataupun media massa. Kedua

adalah dari apa yang peneliti paham dari masa penelitian, beberapa komoditas yang dibahas menjadi penting mempertimbangkan bahwa komoditas tersebut merupakan beberapa di antara banyak komoditas yang memiliki pasar besar dengan besarnya angka kuantitas dan pendanaan yang terlibat dalam perdagangannya. Akan ada Sembilan komoditas yang dikaji yaitu *barley*, daging merah (sapi dan domba), *wine*, kapas, lobster, kayu, batu bara, tembaga, gula.

### **1.2.3 Pertanyaan Penelitian**

Dengan demikian penulis merumuskan masalah penelitian dalam pertanyaan berupa “Mengapa Tiongkok melakukan tindakan *economic coercion* kepada Australia pada tahun 2019-2021?”

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab fenomena yang akan dikaji, yaitu Alasan adanya sanksi ekonomi Tiongkok terhadap Australia. Melihat kembali ke belakang, kedua negara ini memiliki hubungan yang cukup baik secara ekonomi bahkan dapat dikatakan saling bergantung dalam satu komoditas spesifik. Namun hubungan itu harus kandas seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya eskalasi, eskalasi bahkan meningkat sampai pada titik tertentu dimana terdapat

sanksi ekonomi Tiongkok terhadap Australia. Maka dari itu, akan dilihat bagaimana dan mengapa terjadi eskalasi hubungan ekonomi keduanya dan dampaknya terhadap sesamanya.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan utama dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya memperdalam secara lebih lagi terkait relasi Australia dan Tiongkok serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya secara sistematis dan konkret. Sekaligus menambahkan segala jenis informasi terbaru yang mungkin belum pernah disentuh dalam kajian penelitian Australia dan Tiongkok dalam ilmu hubungan internasional. Tentunya penulis berharap dapat membawakan suatu hal yang baru dan mengembangkan kajian terkait terlebih lagi. Sekaligus penulis berharap bahwa tulisan ini akan berguna bagi para akademisi dan peneliti ke depannya dalam meneliti fenomena-fenomena terkait dengan topik penelitian ini.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Weihuan Zhou dan James Laurenceson dalam tulisannya yang berjudul “Demystifying Australia-China Trade Relation”<sup>28</sup> memaparkan bahwa hubungan

---

<sup>28</sup> Zhou, Weihuan, and James Laurenceson. “DEMYSTIFYING AUSTRALIA – CHINA TRADE TENSIONS.” *University of New South Wales Law Research Series*, no. 36 (2021): 1–31. <https://doi.org/https://ssrn.com/abstract=3806162>.

Australia dan Tiongkok telah memburuk dan berada pada titik terendahnya pada tahun 2020, setelah sebelumnya memiliki hubungan dagang yang sangat baik. Dimana Tiongkok kemudian menekankan beberapa kebijakan yang melukai ekspor Australia. Kedua penulis menemukan bahwa peristiwa ini bukanlah sesuatu yang baru dan tidak terduga. Mereka menjelaskan bahwa memang sejak Tiongkok mengalahkan Jepang sebagai rekan dagang internasionalnya pada tahun 2009, telah muncul beberapa spekulasi bahwa Tiongkok akan memanfaatkan posisi dagangnya untuk melakukan koersi terhadap Australia saat merespons ketidaksetujuan politik. Pada tahun 2013 bahkan telah ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa Tiongkok akan memanfaatkan relasi dagangnya dan mengancam otonomi dan keamanan Australia. Pada tahun yang sama juga, Australia sudah mengekspor sekitar 56% dari bijih besinya. Situasi ini sudah menunjukkan ketergantungan Australia terhadap Tiongkok, dan ini juga yang mengakibatkan rusaknya perkembangan ekonomi masing-masing ke depannya. Pada tahun 2010, beberapa komoditas seperti daging, minuman anggur (*wine*), susu bubuk dan bahkan beberapa layanan (*service*) dari Australia juga menjadi komoditas yang utamanya dibeli oleh Tiongkok. Namun beberapa komoditas dan layanan yang terkait bukanlah hubungan dagang yang baik bagi Australia, dimana komoditas dan layanan tersebut bukan hanya spesialisasi Australia dan mudah menemukan negara pengeksport pengganti apabila suatu waktu hubungan dagang keduanya berhenti. Rory Medcalf, Direktur dari *National Security College* di *Australia National University*, mengatakan bahwa Australia perlu hati-hati dalam melakukan perdagangan dengan Tiongkok. Karena meskipun belum melukai Tiongkok,

Tiongkok juga belum melakukan penekanan ekonominya terhadap Australia. Tiongkok terkenal akan menggunakan kekuatan ekonominya dalam hubungan internasionalnya juga termasuk pada pelaksanaan koersi.

Dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya ada alasan yang lebih mendalam, terutama terkait dengan bagaimana dunia berinteraksi dengan Tiongkok. Australia menjadi salah satu negara yang berjanji akan memulai baru hubungan yang sehat dengan Tiongkok. Akan tetapi pihaknya juga memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat, negara yang dianggap menjadi rival terkuat Tiongkok beberapa dekade ke belakang. Tentunya juga hubungan keduanya menjadi sesuatu yang dilihat Tiongkok sebagai sesuatu yang mengancam.

Penulis sepakat dengan penemuan Zhou dan Laurenceson. Penulis juga melihat bahwa memang pertimbangan utama Tiongkok dalam menekankan sanksi adalah atas dasar pertimbangan politik. Penulis juga berargumen bahwa tindakan Tiongkok ini ada hubungannya dengan relasi Australia dengan Amerika Serikat, serta upaya Tiongkok dalam menunjukkan posisinya kini di region Asia.

Meita dan Badrus dalam tulisannya “Relations between Australia and China in Asia -Pacific Region. Case Study: China's Expansionism in Asia-Pacific”<sup>29</sup> dari penulisannya ada beberapa hal yang mereka temukan. Pertama adalah bagaimana seluruh kebijakan Australia lebih berpihak pada dunia barat, dimana kecenderungan perilaku ini sering kali menimbulkan polemik dengan negara-negara Asia Pasifik

---

<sup>29</sup> Nindyawati, Meita Ayu, and Badrus Sholeh. “Relations between Australia and China in Asia-Pacific Region. Case Study: China's Expansionism in Asia-Pacific.” *JURNAL TRANSBORDERS* 4, no. 1 (Desember 2020): 13–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/transborders.v4i1.2489>.



lainnya. Australia juga mendasarkan kebijakan luar negerinya dengan komitmen yang tinggi terhadap regionalisme dan multilateralisme serta juga hubungan bilateral yang kuat dengan para sekutunya. Mereka juga menemukan bahwa Australia berada dalam posisi yang membingungkan. Dimana dari segi keamanan, Australia tidak begitu kuat sendirinya tetapi cukup bergantung pada sekutunya Amerika Serikat. Sedangkan dalam sektor ekonomi perkembangannya bergantung pada Tiongkok. Terlebih lagi dilema meningkat karena kapabilitas ekonomi Tiongkok yang mampu menyaingi Amerika Serikat. Ini menyebabkan Tiongkok tidak takut pada Amerika Serikat yang berujung pada perilaku asertif di sektor maritim yang ditentang oleh Amerika Serikat. Australia akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam sektor keamanan, menimbang tanpa Amerika Serikat keleluasaan dan efektivitas regulasi Australia tidak akan efektif. Mereka juga menemukan bahwa meningkatnya ekonomi Tiongkok kenyataannya berdampak pada Australia, akan tetapi juga menjadi sumber kekhawatiran Australia.

Penulis sepakat dengan penemuan Meita dan Badrus. Dimana memang benar pada saat itu, Australia memiliki ketergantungan tinggi terhadap relasi dagangnya dengan Tiongkok. Akan tetapi di lain sisi Australia juga memiliki hubungan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat. Tentunya hubungan Australia-Amerika Serikat dapat dilihat sebagai ancaman bagi Tiongkok yang mendorong Tiongkok menekan Australia dengan memanfaatkan hubungan dagang mereka. Tentunya ini juga bisa terkait dengan hipotesis penulis, dimana penulis

berargumen bahwa tekanan ekonomi ini merupakan salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh Tiongkok guna menunjukkan posisinya di Asia.

Alan Dupont dalam tulisannya yang berjudul “Resisting China’s Economic Coercion: Why America Should Support Australia”<sup>30</sup> menyatakan bahwa kasus Tiongkok-Australia menunjukkan kemampuan Tiongkok dalam menekan oposisinya melalui sanksi ekonomi yang diberikannya sekeras apa pun pihak oposisinya. Alan menjelaskan bahwa memang hubungan dagang keduanya sangat baik dan saling menguntungkan sampai pada titik dimana keduanya bersepakat untuk menciptakan suatu perjanjian perdagangan. Namun Alan melihat bahwa hubungan keduanya kandas dan semakin parah karena adanya isu geopolitik.

Dalam tulisannya, Alan menjawab suatu pertanyaan penelitian yang serupa dengan penulis. Mengapa Tiongkok menghukum Australia? Alan memaparkan bahwa ‘kesalahan’ Australia adalah dalam memahami kedudukan Tiongkok dan gagal tunduk pada kekuasaan Tiongkok. Alan lebih jauh meneliti bahwa tindakan ini juga merupakan suatu contoh pada negara lainnya agar mereka tunduk pada Tiongkok dan tidak meniru tindakan Australia. Tiongkok sedang menunjukkan dominasinya dan kedudukannya sebagai hegemoni di Asia. Tiongkok juga memandang bahwa Australia adalah negara demokratis dengan nilai-nilai baratnya yang dianut disertai dengan fakta bahwa pihaknya merupakan aliansi Amerika Serikat di Asia menjadi ancaman bagi Tiongkok. Alan berargumen bahwa Tiongkok takut bahwa tindakan Australia akan memotivasi negara-negara lainnya

---

<sup>30</sup> Dupont, Alan. *Resisting China’s Economic Coercion: Why America Should Support Australia*. Sydney, Australia: Centre for Independent Studies, 2021.

untuk bangkit dan memulai koalisi anti-Tiongkok. Namun Alan juga mengakui, bahwa keputusan Tiongkok merupakan sesuatu yang cukup aneh dan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi. Alan berkata bahwa keputusan yang diambil Xi Jinping adalah setelah melalui beberapa peristiwa Australia-Tiongkok, dimana Australia selalu menjadi oposisi aktif yang membuatnya cukup kesal sehingga memutuskan menindak melalui tindakan yang digambarkannya sebagai *'lacking emotional intelligence'* dan *'cultural autism'*. Alan kemudian mengutip perkataan dari Bilahari Kausikan, mantan Menteri Luar Negeri Singapura, yang menyatakan bahwa etnonasionalisme dalam kebijakan Tiongkok sering kali berakhir pada kebijakan yang arogan, kikuk secara diplomasi, acuh dan intoleran (dalam tulisannya *"tone deaf behaviour"*).

Penulis memiliki pandangan yang serupa dengan Alan. Dimana penulis juga melihat bahwa memang tekanan ekonomi Tiongkok benar menunjukkan sikap arogan dan acuhnya terhadap negara tetangganya. Penulis juga setuju bahwa memang ada alasan politis yang memang berkaitan dengan Tiongkok yang ingin menunjukkan kekuasaannya di Asia. Sehingga segala tindakan terkait *economic coercion* penulis lihat sebagai suatu kebijakan geopolitik spesifiknya geoekonomi.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Hubungan internasional merupakan sebuah bidang keilmuan yang sederhananya mempelajari hubungan antara aktor-aktor internasional. Sejatinya,

bidang keilmuan ini berada di bawah bidang keilmuan politik dan sosiologi.<sup>31</sup> Hubungan internasional sendiri dipercaya terlahir dari situasi internasional dan awalnya menjadi suatu bidang keilmuan yang timbul dari konflik dan peperangan, tepatnya mulai menjadi populer pasca perang dunia kedua.<sup>32</sup> Sejak terciptanya, bidang keilmuan mengalami perkembangan pesat. Hubungan internasional sejatinya mempelajari hubungan antara negara yang tentunya berkaitan dengan politik. Dengan berkembangnya disiplin hubungan internasional, pembahasan keilmuan ini juga semakin meluas menyentuh topik media internasional, organisasi internasional, politik dan keamanan tradisional, serta ekonomi internasional. Ekonomi kini menjadi suatu sektor yang semakin vital dan terpadu dengan bidang politik. Ekonomi sendiri sudah terbukti menjadi sesuatu yang sangat penting pada era modern, dimana sering kali ditemukan bahwa suatu kebijakan politik diberlakukan atas pertimbangan ekonomi. Dapat juga berlaku sebaliknya dimana kebijakan ekonomi didasari atas kepentingan politik. Dengan meningkatnya keterhubungan ekonomi dan politik, tentunya pembahasan ekonomi internasional dalam hubungan internasional menjadi sesuatu yang masuk akal dan relevan.

*International Politic Economics* atau Ekonomi Politik Internasional merupakan salah satu pandangan yang diadopsi ke dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Ekopolin sendiri merupakan pandangan multidisipliner yang memperhatikan dua dimensi yakni politik dan ekonomi. Dari dimensi politik,

---

<sup>31</sup> Jackson, Robert. "Why Study IR?" In *Introduction to International Relations Theories and Approaches*, edited by Georg Sørensen, 5th ed., 4. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013.

<sup>32</sup> Wight, Colin. "International Relations and Social Science." In *International Relations Theories Discipline and Diversity*, edited by Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith, 3rd ed., 16. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013.

ekopolin mengakui adanya penggunaan *power* oleh para aktor.<sup>33</sup> Para aktor membuat keputusan terkait distribusi barang yang nyata seperti uang ataupun produk serta hal yang tak berwujud seperti inovasi dan keamanan.<sup>34</sup> Dalam hampir semua kasus, politik meliputi bagaimana negara dan peradaban membuat peraturan untuk mencapai tujuan atau kepentingannya.<sup>35</sup> Kemudian juga dalam dimensi ekonomi, ekopolin membahas bagaimana sumber daya terbatas didistribusi kepada individu, kelompok, serta negara.<sup>36</sup> Ekopolin mempercayai ‘pasar’ bukan hanya sebagai tempat dimana aktor atau masyarakat melakukan kegiatan jual beli, secara lebih dalam pasar digambarkan sebagai suatu penggerak yang membentuk perilaku manusia.<sup>37</sup> Ekopolin adalah pandangan irisan politik dan ekonomi yang menunjukkan bahwa keduanya semakin terintegrasi. Percaturan internasional yang merupakan dimensi politik semakin melibatkan dimensi ekonomi. Sehingga terdapat pertimbangan ekonomi saat seorang aktor mengambil suatu keputusan politik, sebaliknya terdapat juga pertimbangan politik saat seorang aktor mengambil keputusan ekonomi. Sehingga kebijakan ekonomi yang dilandaskan pada kepentingan politik adalah sesuatu yang lazim terjadi.

*Power* merupakan konsep lainnya yang juga menjadi penting dalam setiap kajian hubungan internasional. *Power* atau kekuasaan/kekuatan didefinisikan sebagai sesuatu yang mampu kan suatu aktor untuk mempengaruhi tindakan aktor

---

<sup>33</sup> Balaam, David N, and Bradford Dillman. “Perspective on International Political Economy.” Essay. In *Introduction to International Political Economy* 6, 6:8. New Jersey, United States: Pearson Education, Inc, 2013.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

lainnya.<sup>38</sup> *Power* sendiri umumnya dapat berupa kekuatan militer atau ekonomi serta beberapa bidang lainnya yang mungkin tidak dipandang begitu signifikan seperti kultur.<sup>39</sup> Ekonomi dan militer sendiri dikategorikan sebagai *hard power* sedangkan *power* lainnya dikategorikan sebagai *soft power*.<sup>40</sup> Salah satu contoh nyata dari pemanfaatan kekuatan ekonomi sebagai *power* adalah mengancam melalui sanksi ekonomi.

Konsep selanjutnya yang akan diperkenalkan adalah salah satu konsep terpenting yang sering kali disebut dalam setiap penelitian hubungan internasional yakni kepentingan nasional. Pada dasarnya kepentingan nasional merupakan suatu objektif yang terlahir dari setiap negara berdasarkan dengan kondisi spesifiknya masing-masing.<sup>41</sup> Kepentingan nasional menjadi suatu objektif sekaligus pendorong suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan.

Hubungan bilateral merupakan suatu konsep dasar dan sederhana dalam hubungan internasional. Dalam menjalankan kebijakan ataupun melakukan diplomasi, terdapat beberapa jalur. Bilateral dalam kebijakan dan diplomasi berarti sebuah hubungan atau jalur yang berada diatas dasar landasan kepentingan dua negara. Tentunya dalam hubungan bilateral perlu ada kesamaan kepentingan yang menjadi penggerak kedua belah pihak. Bilateral umumnya mudah dijalankan

---

<sup>38</sup> Kaufman, Joyce P. "Theoretical Overview." In *Introduction to International Relations Theory and Practice*, 39. Plymouth, United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2013.

<sup>39</sup> *Ibid*, 41

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> *Ibid*, 32

karena hanya mempertimbangkan kepentingan dua negara dan umumnya akan bersifat mutual.

*Economic statecraft* merupakan sebuah konsep yang cukup luas yang mengkaji hubungan ekonomi dan politik. Sebelumnya konsep ini merupakan sebuah konsep yang cukup luas dan memiliki banyak pengertian. Sehingga belum ada pengertian yang tepat dan spesifik serta absolut terkait konsep juga di dalam konsep besar ini terdapat beberapa konsep-konsep lainnya.<sup>42</sup> Dalam tulisan Baldwin terdapat *economic techniques of statecraft* yang dijelaskan sebagai upaya pemerintah dalam mempengaruhi dengan cara mengandalkan sumber daya ataupun komoditasnya yang memiliki nilai uang yang tinggi dalam pasar.<sup>43</sup> Konsep ‘*economical*’ dalam konsep ini cukup diperdebatkan. Beberapa akademisi seperti Klaus Knorr menjelaskan konsep ekonomi dari sudut pandang pengaruh dan kekuatan (*power*),<sup>44</sup> Knorr mendefinisikan “*economic power*” sebagai “*economic policy*”. Terdapat tiga konsep dasar dan general dalam konsep besar *economic statecraft* antara lain, Jenis instrumen kebijakan yang digunakan untuk mempengaruhi, Domain (mengacu pada aktor) yang dipengaruhi, Jangkauan yang dipengaruhi (mengacu pada dimensi perilaku target seperti kelakuan, kepercayaan, pendapat, emosi, dan lain-lain).<sup>45</sup> *Economic statecraft* dijelaskan oleh Benjamin Cohen dan Robert Pastor sebagai “*Foreign Economic Policy*”.<sup>46</sup> Stephen D. Cohen kemudian mengembangkan konsep menjadi apa yang disebut sebagai

---

<sup>42</sup> Halaman 28

<sup>43</sup> *Ibid*, 29

<sup>44</sup> *Ibid*, 30

<sup>45</sup> *Ibid*, 31

<sup>46</sup> *Ibid*, 32

“*International Economic Policy*”.<sup>47</sup> *Economic statecraft* dijelaskan oleh Klaus Knorr sebagai “*Economic Leverage*”<sup>48</sup>. Konsep *economic statecraft* juga sering kali didefinisikan sebagai “*economic diplomacy*”, “*economic warfare*”, “*economic sanction*”, serta “*economic coercion*”.<sup>49</sup> Pada dasarnya konsep ini dapat diturunkan menjadi lebih banyak konsep yang lebih kecil. Setiap konsep menjelaskan mengenai bagaimana ekonomi dilihat sebagai sebuah bidang yang mampu membawa pengaruh baik dalam bidangnya sendiri maupun bidang non-ekonomi, seperti politik dan kebijakan internasional. Beberapa prinsip yang ditekankan dalam konsep *economic statecraft* antara lain adalah bahwa konsep ini menekankan cara atau metode (*means*) dibandingkan hasil atau output (*ends*), konsep ini tidak membatasi jangkauan dari objektif yang dicapai melalui metode ekonomi, konsep ini memperlakukan instrument kebijakan sebagai suatu konsep properti, terakhir adalah bahwa konsep ini menjelaskan dan menekankan konsep ‘ekonomi’ sesuai dengan pandangan konsepnya masing-masing.<sup>50</sup>

Konsep selanjutnya yang akan digunakan dan dianggap paling relevan dalam mengkaji topik yang diajukan adalah *economic coercion*. *Economic coercion* merupakan suatu konsep yang tidak asing dalam politik dan kebijakan internasional pada abad ke-21. Tindakan ini merupakan salah satu senjata yang memang kerap kali dilakukan oleh para negara guna membekukan oposisinya dari mengambil tindakan yang merugikan pihaknya atau pihak lain. *Economic coercion* sendiri pada

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 33

<sup>48</sup> *Ibid*, 34

<sup>49</sup> *Ibid*, 34-39

<sup>50</sup> *Ibid*, 39



dasarnya merupakan sebuah konsep turunan dari konsep dasar ‘coercion’ atau koersi yang berasal dari kata Latin *com-* (bersama) dan *arcece* (membuka atau menahan).<sup>51</sup> Secara historis tercatat bahwa pertama kali konsep ini digunakan pada 1475 dalam wujud kata *cohercen* yang menjelaskan pengaplikasian kekuatan (*force*) untuk mengontrol bukan hanya perilaku (*conduct*) aktor lain tetapi juga tubuh fisik, pikiran, dan juga ide.<sup>52</sup> Konsep berkembang sampai pada dikenalnya *economic coercion* kini yang dapat dijelaskan sebagai ancaman atau tindakan oleh suatu pemerintahan atau kumpulan pemerintahan untuk mengganggu (*disrupt*) pertukaran ekonomi atau perdagangan terhadap suatu pihak, sampai pada pihak tersebut memenuhi permintaan pihak penuntut.<sup>53</sup> Johan Galtung juga memaparkan pengertian yang serupa dimana dia mengartikan *economic coercion* sebagai suatu aksi yang diinisiasikan oleh satu atau lebih aktor internasional (yang kemudian ia sebut sebagai ‘*senders*’) terhadap satu atau lebih aktor lainnya (ia sebut pihak ini sebagai ‘*receivers*’) dengan maksud antara lain untuk menghukum para penerima dengan mengurangi (*deprive*) nilai (*value*) mereka atau membuat penerima patuh akan nilai-nilai yang diminta oleh pengirim, atau bahkan keduanya.<sup>54</sup>

Dalam tulisannya, Drezner mencantumkan apa yang disebut sebagai “*model of economic coercion*” yang menjelaskan tahap-tahap yang berpotensi terjadi dalam suatu tindakan *economic coercion* yang akan digunakan sebagai *framework* dalam

---

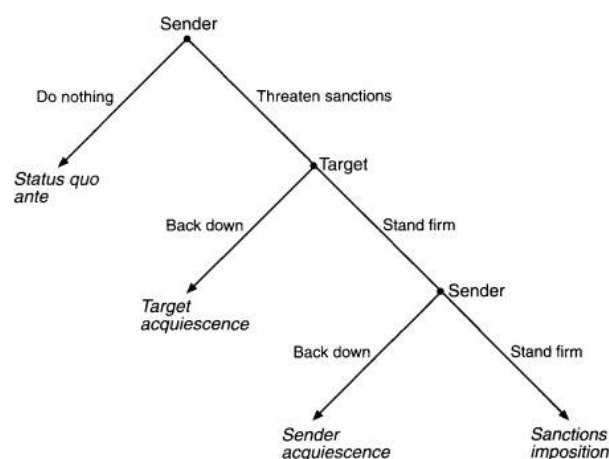
<sup>51</sup> Hafiz, Hiba. *Beyond Liberty: Toward a History and Theory of Economic Coercion* 83 (2016): 1072. [https://doi.org/https://chicagounbound.uchicago.edu/journal\\_articles/8815/](https://doi.org/https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/8815/).

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Drezner, Daniel W. “International Organization.” *The Hidden Hand of Economic Coercion* 57, no. 03 (Juni 2003): 643. <https://doi.org/10.1017/S0020818303573052>.

<sup>54</sup> Olson, Richard Stuart. “World Politics.” *Economic Coercion in World Politics: With a Focus on North-South Relations*, 4, 31 (Juli 1979): 471–94. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/2009906>

membantu menjelaskan topik terkait. Diawali dengan pihak pengirim, apabila pihak pengirim memutuskan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan *economic coercion* akan tercipta *status quo ante*, potensi lainnya adalah apabila sang pengirim memutuskan untuk mengancam dan mengenakan sanksi terhadap suatu target. Dalam alur ini akan tercipta dua potensi. Pertama adalah apabila sang target menyerah maka akan tercipta kondisi yang disebut sebagai '*target acquiescence*', apabila sang target memutuskan untuk tetap pada pendiriannya maka kemudian akan ada dua potensi perlakuan dari sang pengirim, ini juga yang digambarkannya sebagai tahapan terakhir. Apabila sang target tetap pada pendiriannya, maka pengirim memiliki dua keputusan. Pertama adalah menyerah, kondisi ini kemudian disebut '*sender acquiescence*'. Pilihan lain adalah tetap dengan pendiriannya, posisi ini disebut sebagai '*sanction imposition*' dimana sanksi tetap dijalankan.



Gambar 1.1. Model *Economic coercion* Dalam Tulisan Daniel W. Drezner  
 Sumber: Drezner, Daniel W. "International Organization." *The Hidden Hand of Economic Coercion* 57, no. 03 (Juni 2003): 646. <https://doi.org/10.1017/S0020818303573052>.

Cooper Drury dalam tulisannya menyebutkan bahwa ada dua hal yang menjadi tujuan suatu pihak memutuskan untuk melakukan *economic coercion*. Alasan pertama adalah apa yang dia sebut sebagai *economical warfare*. *Economic coercion* dalam kasus ini ditujukan guna melemahkan kekuatan lawan sebelum konflik.<sup>55</sup> Alasan lainnya adalah apa yang digambarkan sebagai *economic versus political goals*. Drury berargumen bahwa dalam kasus ini, pengirim sanksi bertujuan untuk mengubah kebijakan atau pendirian pihak oposisi.<sup>56</sup> Lebih dalam Drury menyatakan bahwa kebanyakan penelitian terhadap sanksi ekonomi utamanya dilandasi oleh kepentingan politik meskipun pada permukaannya terlihat seperti kepentingan ekonomi.<sup>57</sup>

Konsep terakhir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep geoekonomi. Geoekonomi merupakan sebuah konsep yang pertama kali dikenalkan pada taun 1990.<sup>58</sup> Dimana pada saat itu, perang sudah dianggap selesai dan aliansi pimpinan Amerika Serikat sudah menang dan tidak ada yang dapat mengalahkan dominasi ataupun dapat menjadi alternatif hegemoni, demokrasi dan liberalisme yang dipopulerkan oleh pihak Barat.<sup>59</sup> Hudson mendefinisikan geoekonomi sebagai strategi dalam memperoleh kontrol teritorial yang didorong atau termotivasi oleh

---

<sup>55</sup> Drury, A Cooper. "Economic Coercion in Theory and Practice." Chapter. In *ECONOMIC SANCTIONS AND PRESIDENTIAL DECISIONS: Models of Political Rationality*, 13. New York, United States: PALGRAVE MACMILLAN, 2005.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*, 17

<sup>58</sup> Scholvin, Sören, and Mikael Wigell. "Power Politics by Economic Means: Geoeconomics as an Analytical Approach and Foreign Policy Practice." *Comparative Strategy*, 2018, 76. <https://doi.org/10.1080/01495933.2018.1419729>.

<sup>59</sup> *Ibid*,

ekonomi dan diaplikasikan melalui kebijakan ekonomi, utamanya melalui investasi dan perdagangan.<sup>60</sup>

Penelitian kontemporer menemukan bahwa ekonomi kini menjadi sesuatu yang vital bagi apa yang dikenal sebagai *power politics*.<sup>61</sup> Hsiung berargumen bahwa geoekonomi merupakan sebuah perpindahan keresahan keamanan dari sektor militer menuju sektor ekonomi, terutama menimbang peranan Tiongkok dalam politik global.<sup>62</sup> Mattlin dan Wigell dalam tulisannya juga menemukan bahwa strategi geoekonomi merupakan sesuatu yang umum digunakan oleh kekuatan non-barat, seperti Tiongkok, Brasil dan India, yang bergantung pada kekuatan nonmiliter dalam mengimbangi Amerika Serikat.<sup>63</sup> Vihma dan Wiegell dalam tulisan yang sama melakukan penelitian terkait kebijakan Rusia dalam menekankan kekuasaannya (*power*) terhadap negara tetangganya melalui sektor militer dan juga sektor ekonomi, mereka menemukan bahwa menerapkan keduanya akan sebaliknya menurunkan efektivitasnya apabila diberlakukan secara bersamaan.<sup>64</sup>

Dalam tulisan ini juga, dibahas mengenai argumen dan literasi tradisional yang dituliskan oleh Luttwak. Luttwak berargumen bahwa persaingan antara kumpulan negara akan tetap berlangsung, akan tetapi metode (*means*) yang dipreferensikan untuk mencapai tujuan utamanya akan menggunakan metode

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

ekonomi dibandingkan militer.<sup>65</sup> Dalam tulisan yang sama Schlovin berargumen bahwa pendapat Luttwak tidak sepenuhnya benar. Instrumen ekonomi dan militer akan terus digunakan secara berdampingan (*coexist*), metode ekonomi tidak akan sepenuhnya menggantikan metode militer.<sup>66</sup> Metode tertentu akan digunakan dengan mempertimbangkan permasalahan apa yang dihadapi oleh negara.<sup>67</sup>

Pada akhirnya, konsep dari geopolitik sendiri masih menjadi sesuatu yang cukup diperdebatkan diantara para akademisi. Akan tetapi dalam tulisannya, Schlovin merangkum konsep geopolitik sebagai sesuatu yang dipahami sebagai strategi kebijakan internasional sekaligus *analytical framework*, yang berfokus pada negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri.<sup>68</sup> Geoekonomi sebagai strategi kebijakan luar negeri mengacu pada pengaplikasian kekuatan ekonomi untuk merealisasikan kepentingan atau objektif strategis, atau apa yang dia singkat sebagai “*the geostrategic use of economic power*”.<sup>69</sup>

---

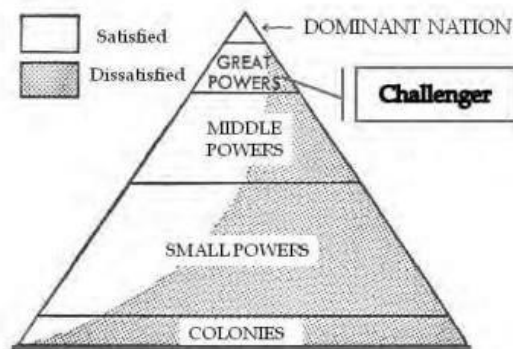
<sup>65</sup> *Ibid*, 74

<sup>66</sup> *Ibid*, 76

<sup>67</sup> *Ibid*, 77

<sup>68</sup> *Ibid*, 80

<sup>69</sup> *Ibid*.



Source: Figure from Organski (1961), challenger added by author.

Gambar 1.2. Piramida *Transition Theory* Dilansir dari Tulisan David Lai  
 Sumber: Lai, David. "The Power Transition Theory." Chapter. In *THE UNITED STATES AND CHINA IN POWER TRANSITION*, 6. Strategic Studies Institute, US Army War College, 2011.

Konsep yang juga berkaitan dengan geopolitik dan geoekonomi adalah konsep hegemoni. Kata hegemoni sendiri merupakan suatu konsep yang mengacu pada entitas negara terkuat dan paling dominan dalam percaturan internasional. Salah satu teori yang menjelaskan mengenai posisi dan dinamika hegemoni adalah *power transition theory*. Pemahaman utama dalam teori dan konsep hegemoni adalah bahwa sang hegemoni memiliki kekuasaan dominan beserta dengan rekan-rekan dekatnya akan selalu berupaya menjaga perdamaian dan stabilitas selama masa kepemimpinannya.<sup>70</sup> Namun setiap pemimpin memiliki nilai, metode dan kepentingannya masing-masing sehingga kerap kali mengakibatkan adanya

<sup>70</sup> Lai, David. "The Power Transition Theory." Chapter. In *THE UNITED STATES AND CHINA IN POWER TRANSITION*, 6. Strategic Studies Institute, US Army War College, 2011.

perpecahan antara kepuasan dan ketidakpuasan pihak dipimpin.<sup>71</sup> Menimbang juga struktur internasional yang fluktuatif beserta dengan adanya perbedaan kepentingan tiap negara, transisi kekuatan dan kekuasaan adalah hal yang potensial terjadi.<sup>72</sup> Gilpin berargumen bahwa beberapa pihak yang kurang puas akan mencoba berkonfrontasi kepada pihak penguasa terkait hal yang mereka rasa kurang memuaskan, antara lain dia menyebutkan kebijakan dalam memerintah beserta sistem internasional terkini, pembagian dari lingkungan pengaruh (*sphere of influence*), serta pertikaian wilayah<sup>73</sup> Kemudian Gilpin juga menambahkan bahwa apabila pihak yang bangkit dan pihak penguasa tidak menemukan titik temu, maka ada peluang terjadi konflik bahkan hingga perang.<sup>74</sup>

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan

### 1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Secara spesifik akan ada dua metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah *historical research*.<sup>75</sup> Metode ini berdasarkan pada argumen bahwa apa yang terjadi saat ini dan di masa depan adalah suatu dampak dari peristiwa atau fenomena yang terjadi di masa lalu. Metode ini juga mengutamakan adanya kronologi kejadian,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*, 6-7

<sup>74</sup> *Ibid*, 7

<sup>75</sup> Lune, Howard, and Bruce L Berg. "Social Historical Research and Oral Tradition." In *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, 9th ed., 158–69. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2017.

dimana runtutan peristiwa dijelaskan dengan adanya garis waktu yang jelas. Adanya garis waktu yang jelas akan memungkinkan terlihatnya pola yang terjadi di masa lalu dan bagaimana hal tersebut akan berdampak terhadap situasi apa yang ada saat ini. Data utama dalam metode ini umumnya berupa dokumentasi sejarah yang tertulis, namun dalam penelitian ini dokumen sejarah akan diganti dengan dokumen perjanjian-perjanjian yang pernah ada ataupun dengan melihat perkembangan hubungan Australia dan Tiongkok.

Metode penelitian yang lain adalah metode penelitian *case study*.<sup>76</sup> Metode penelitian ini akan berfokus meneliti satu kasus ataupun fenomena secara spesifik. Metode ini juga akan melihat pola-pola yang ada untuk dapat lebih menjelaskan suatu fenomena secara rinci. Kemudian pola dan data yang ditemukan akan dikaji dengan menggunakan teori yang tersedia dan sudah dipersiapkan untuk mengkaji topik terkait. Secara lebih mendalam lagi metode yang akan digunakan adalah *collective case studies* yang melihat beberapa kasus, membandingkannya lalu kemudian juga melihat beberapa instrumen yang berpengaruh dalam suatu fenomena. Kemudian jenis penelitian kasus yang akan digunakan adalah *explanatory case studies*. Dimana dalam jenis penelitian ini akan dilihat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena ataupun kondisi. Dan kemudian akan dikaji menggunakan teori yang sudah dipersiapkan. Dengan melihat banyaknya faktor yang berpengaruh dan kemudian dikaji dengan teori tersedia,

---

<sup>76</sup> Lune, Howard, Bruce L. Berg. "Case Studies." In *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, edited by Howard Lune, 9th ed., 170–80. Harlow, England: Pearson education Limited, 2017.



akan didapatkan sebuah penjelasan yang akan ditunjukkan untuk menjawab anomali penelitian.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer akan berupa data-data publikasi resmi dari pemerintahan negara Australia dan Tiongkok juga publikasi resmi organisasi atau lembaga internasional. Data primer lainnya juga yang akan digunakan adalah dokumentasi perjanjian-perjanjian perdagangan, apabila memungkinkan. Data sekunder akan berupa data-data yang bersumber dari buku-buku dan jurnal atau penelitian lainnya yang terkait dengan topik utama pembahasan. Dapat juga berupa informasi yang didapatkan dari situs-situs resmi negara atau organisasi internasional ataupun surat kabar.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Tulisan penelitian akademik ini akan terbagi menjadi empat bab dengan keterangan pembahasan sebagai berikut.

**BAB I: Pendahuluan.** Bab ini berisikan beberapa subbab antara lain latar belakang masalah, deskripsi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, metode penulisan, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II: Perkembangan Hubungan Australia dan Tiongkok. Akan membahas profil perdagangan kedua negara, bagaimana kedua belah pihak mengalami kemunduran dalam relasi perdagangannya dan bagaimana bisa sampai bereskalasi menjadi suatu kondisi tindakan *economic coercion* Tiongkok terhadap Australia. Pembahasan akan dibuat per tahun antara tahun 2016 sampai pada 2021. Akan melihat pada rentetan peristiwa yang mendorong hingga pada kondisi hubungan yang ada saat ini sampai pada titik sanksi ekonomi.

BAB III: Pengeunaan *Economic coercion*. Akan berfokus pada meninjau bagaimana sanksi dijalankan, terhadap komoditas apa saja, dan bagaimana dampak tarif terhadap keduanya, dan apakah sudah ada upaya menyelesaikan perkara dalam pengadilan internasional. Kemudian juga akan membahas kepentingan Tiongkok dalam menekankan *economic coercion* terhadap Australia. Merupakan bagian analisis yang memperdalam kaitan kasus dan teori yang sudah dipaparkan. Akan berusaha menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana Tiongkok mempertimbangkan *economic coercion* berdasarkan kepentingannya, secara ekonomi dan politik juga akan membahas *economic coercion* Tiongkok dalam konteks internasional melihat dari kepentingan nasionalnya.

BAB IV: Kesimpulan. Bab terakhir ini akan ditujukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data dan Analisa yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.